

## **ANALISIS KONDUSIFITAS KELEMBAGAAN DAN SOSIO-KULTURAL MASYARAKAT BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH SEKITAR JEMBATAN SURAMADU SISI MADURA**

**Bondan Satriawan**

(Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura)

### **Abstract**

*This study tries to picture the conduciveness of the region around Suramadu Bridge of the Madura side that consist of 8 vilages. The main focus of the study is to see how far the institutional and sosio-cultural condition of the surrounding society supports the further potency of development in that region. By doing so the study uses Likert scale to quantify the magnitude of the support for further economic development for the region. This study surveys 320 respondens from those 8 vilages purposively. The result of the study shows that in general there is no problem with institutional and sosio-cultural of the related region to support the further economic development of the region.*

*Key words: Institutional and sosio-cultural, Economic development, Suramadu bridge, Madura side*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya jembatan nasional Suramadu adalah berkembangnya perekonomian di Madura. Hal ini sangat penting mengingat bahwa pulau Madura merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Pulau Madura dikenal juga sebagai kantong kemiskinan di Jawa Timur dimana keempat kabupaten di pulau Madura masuk sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan diatas rata-rata kabupaten lain di Jawa Timur (BPS, 2008).

Diantara cara untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan kesempatan kerja baru. Agar hal tersebut terlaksana diperlukan investasi yang memadai di

pulau Madura. Apalagi dengan adanya jembatan Suramadu maka prospek investasi tersebut diharapkan semakin terbuka lebar (BPM Jatim 2004). Meskipun demikian perlu dipikirkan agar investasi yang akan melahirkan industrialisasi di pulau Madura tidak bertabrakan dengan kultur, adat istiadat dan keyakinan yang dipegang teguh oleh masyarakat Madura selama ini dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan ekonomi di kawasan Madura (Subahariyanto dkk 2004).

Berbagai studi terkait potensi industrialisasi atau ekonomi di pulau Madura telah dilakukan, diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2007), dimana dalam studinya menyimpulkan bahwa keberadaan berbagai potensi

ekonomi di Madura didukung dengan jembatan Suramadu akan menghasilkan proses industrialisasi yang optimum melalui integrasi kawasan Madura dengan gerbangkertasusila yang telah lebih dulu berkembang.

Studi yang dilakukan oleh Hakim A (2009) mencoba memetakan berbagai potensi ekonomi di Madura mulai dari sektor primer semisal pertanian hingga sektor tersier seperti pariwisata, termasuk juga berusaha mendeskripsikan hierarki tata ruang baik untuk wilayah Madura maupun Surabaya kaitannya dengan potensi pengembangan ekonomi di Madura Pasca Suramadu. Dalam studi ini, peneliti berusaha dideskripsikan bagaimana aspek ekonomi dan sosial mampu berpengaruh secara positif terhadap penyusunan tata ruang (spatial) di pulau Madura dan juga Surabaya pasca dibangunnya jembatan Suramadu sehingga mampu memberikan dampak positif dari sisi ekonomi bagi kedua wilayah tersebut.

Dari sudut perencanaan pembangunan yang komprehensif, selain pemetaan potensi ekonomi dan tata ruang diperlukan juga pemetaan tingkat kondusifitas suatu wilayah dari sisi sosial kemasyarakatan. Pemetaan ini antara lain berupa gambaran kondisi sosio kultural masyarakat yang ada saat ini kaitannya dengan kesiapan atau daya dukung terhadap rencana pengembangan atau pembangunan suatu wilayah. Termasuk juga keberadaan lembaga sosial yang ada di wilayah tersebut baik yang formal maupun yang non-formal. Dimana banyak kasus cenderung dipilih oleh responden untuk sekedar lebih

perlu juga di ketahui seberapa jauh lembaga-lembaga tersebut mampu mendukung proses pengembangan suatu wilayah.

Terkait dengan hal-hal tersebut maka fokus utama dari studi ini adalah untuk menganalisa kondisi terkini masyarakat di sekitar kaki jembatan suramadu sisi Madura dalam hal tingkat kondusifitas kelembagaan dan sosio kultural masyarakat. Dengan diketahuinya gambaran umum tentang kondusifitas kelembagaan dan sosio kultural masyarakat masyarakat di wilayah tersebut diharapkan bisa diketahui hal-hal apa saja dari aspek tersebut yang bisa mendukung percepatan pembangunan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu juga tentunya bisa pula diketahui hal-hal yang masih harus dibenahi dari masyarakat di wilayah tersebut agar tidak berdampak negatif bagi pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut. Termasuk juga harapan-harapan dari masyarakat di wilayah ini.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan skala Likert sebagai alat analisis utama. Skala Likert yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 4 (empat) skala pilihan, yaitu; Sangat Rendah atau sangat Buruk (nilai 1); Rendah atau Buruk (nilai 2); Tinggi atau Baik (nilai 3), dan Sangat Tinggi atau Sangat Baik (nilai 4). Peneliti menggunakan 4 skala pilihan untuk menghindari kecenderungan jawaban yang netral yang dalam mudah menjawab, atau terkait dengan pertanyaan yang bersifat

sensitif. Dengan menggunakan 4 skala pilihan responden 'dipaksa' memilih diantara dua kutub jawaban yang berbeda (Sclove 2001).

Selain menggunakan skala Likert, studi ini juga menggunakan beberapa pertanyaan *semi* tertutup kepada responden untuk mengetahui lebih dalam permasalahan yang sedang diteliti. Terkait dengan hal tersebut instrument pengumpulan data utama yang digunakan adalah kuisiner terstruktur. Kuisiner ini berisi berbagai pertanyaan terkait kelembagaan dan sosiokultural masyarakat hubungannya dengan tingkat kondusifitas pengembangan wilayah pasca dibangunnya jembatan nasional Suramadu.

Penelitian ini menggunakan 320 responden dari 8 desa di sekitar

kaki jembatan Suramadu di sisi Madura. Desa tersebut adalah; Desa Baengas, Desa Burneh, Desa Masaran, Desa Morkepek, Desa Petepan, Desa Pangpong, Desa Sendang Dajah dan Desa Sukolilo Barat. Untuk masing-masing desa diambil 40 responden secara purposif yang dikelompokkan kedalam kategori perangkat desa, pemuka masyarakat non perangkat desa dan masyarakat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ANALISIS KONDUSIFITAS KELEMBAGAAN DAN SOSIO-KULTURAL WILAYAH

Secara ringkas hasil dari studi ini bisa dilihat pada Tabel I.1.

**Tabel I.1**  
**Indikator Utama Kondusifitas Kelembagaan dan Sosio-Kultural**

No	Jenis Indikator	Nilai Indeks*
1	Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara	2.9
2	Tingkat Kriminalitas	3.1
3	Potensi Kriminalitas Pemuda	3.2
4	Potensi Konflik Horisontal	3.4
5	Kepuasan thd Penyelesaian Konflik Horisontal	2.8
6	Peran Aktif Pemerintah Desa dlm Mencegah Konflik Horisontal	2.8
7	Peran Aktif Tokoh Masyarakat dlm Mencegah Konflik Horisontal	2.9
8	Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.0
9	Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal	3.5

\* = Nilai Indeks adalah antara 1 sampai dengan 4.  
Dimana semakin mendekati nilai "1" mencerminkan kondisi yang semakin buruk dan sebaliknya semakin mendekati "4" mencerminkan kondisi yang semakin baik.

Sumber: Data primer diolah, 2009

### **Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan**

Ketertiban dan keteraturan kehidupan bermasyarakat akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat tersebut. Di sisi lain tanpa adanya hukum dan peraturan beserta usaha-usaha penegakannya maka mustahil hal tersebut bisa dicapai. Oleh karena tingkat kepatuhan yang baik suatu masyarakat terhadap hukum dan peraturan Negara menjadi hal pokok yang tidak bisa ditawar.

Dari survei yang dilakukan dalam rangka untuk menggali informasi terkait hal ini, maka dari angka indeks yang diperoleh, tampak bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sekitar kaki Suramadu sisi Madura terhadap hukum dan peraturan Negara cukup tinggi. Terlihat dari tabel indikator bahwa nilai indeks nya adalah 2,9 (dalam skala 4). Hal ini merupakan modal positif bagi pengembangan dan pembangunan wilayah disekitar kaki jembatan Suramadu sisi Madura. Meskipun tentunya tingkat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan negara ini masih bisa dan harus ditingkatkan lagi.

Tingkat kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Negara masyarakat sekitar kaki jembatan Suramadu sisi Madura juga didukung dengan cukup baiknya tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga

pemerintahan yang ada. Hal ini bisa dilihat dari jawaban yang diberikan oleh mereka terhadap pertanyaan terkait dengan bila ada pelaku kejahatan yang tertangkap. Ternyata mayoritas masyarakat menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib, baik langsung kepada pihak kepolisian maupun melalui perangkat desa ataupun tokoh masyarakat yang ada.

**Tabel I.2**

**Jenis Tindakan yang Diambil Masyarakat Bila Ada Pelaku Kejahatan yg Tertangkap**

Jenis Tindakan	%
Dihakimi masyarakat	4,1 %
Diserahkan perangkat Desa	30,3 %
Diserahkan Polisi	48,1 %
Diserahkan ke tokoh masyarakat	12,8 %
Lainnya	4,4 %

Sumber: Data Primer 2009

Terlihat dari tabel bahwa lebih dari 90% masyarakat memilih tindakan yang mencerminkan adanya kepercayaan terhadap sistem kelembagaan yang ada. Hanya kurang dari 5% saja masyarakat yang memilih untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap di wilayah mereka.

Hal ini tentunya merupakan nilai positif yang sangat berpotensi dalam mendukung pengembangan dan pembangunan ekonomi dan sosial wilayah tersebut dimasa yang akan datang.

### **Tingkat Kriminalitas**

Keamanan suatu wilayah juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk mencapai kemajuan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Salah satu indikator untuk melihat tingkat keamanan adalah tingkat kriminalitas di suatu wilayah. Semakin tinggi atau semakin sering terjadi tindak kriminal di wilayah tersebut maka hal tersebut mencerminkan rendahnya keamanan di wilayah tersebut, demikian juga sebaliknya.

Masalah keamanan adalah salah satu hal utama yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam dunia investasi riil. Pertanyaan pertama yang akan muncul bagi para investor baik Investor Nasional maupun Internasional adalah mengenai kondisi keamanan wilayah yang menjadi tujuan investasi mereka. Hal ini bisa dimengerti karena terkait dengan biaya yang harus mereka keluarkan nantinya.

Semakin tidak aman suatu wilayah maka bisa dipastikan pihak investor harus menganggarkan biaya tambahan yang cukup besar untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak mengganggu bisnis mereka, dan demikian juga sebaliknya. Munculnya biaya tambahan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam era yang sangat kompetitif seperti saat ini.

Di dalam dunia usaha, tambahan biaya berarti dua hal. Pertama, harga jual produk yang lebih tinggi untuk mengkompensasi tambahan biaya tersebut, atau kedua, adanya pengurangan profit sebagai akibat keputusan untuk tidak

menaikkan harga jual komoditas tersebut agar tetap bisa bersaing di pasar yang kompetitif. Keduanya merupakan konsekuensi yang sebisa mungkin dihindari oleh dunia usaha khususnya calon investor baik nasional maupun internasional.

Pengembangan ekonomi suatu wilayah oleh karenanya tidak bisa dilepaskan dari seberapa baik kondisi keamanan suatu wilayah yang salah satunya dicerminkan dengan tingkat kriminalitas yang ada. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini juga berusaha menangkap kondisi tersebut langsung dari masyarakat di sekitar kaki jembatan Suramadu sisi Madura. Hasil yang diperoleh cukup menggemberikan karena ternyata tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah tersebut bisa dibilang cukup rendah. Hal ini bisa terlihat dari indeks tingkat kriminalitas yang menunjukkan angka 3.1 (skala 4). Ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut masyarakat merasa bahwa kondisi keamanan yang terkait kriminalitas cukup baik.

Kondisi ini merupakan modal dasar yang bagus bagi proses pengembangan ekonomi wilayah tersebut. Kondisi ini harus dijaga dan diusahakan menjadi lebih bagus lagi bila memang wilayah ini ingin mencapai akselerasi dalam pengembangan ekonomi wilayah setelah berdirinya jembatan Suramadu.

Menurut masyarakat sekitar, tindakan kriminal yang sering terjadi di wilayah penelitian ini masih didominasi oleh jenis kriminalitas ringan yaitu pencurian. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut;

**Tabel I. 3**  
**Tindak Kriminalitas**  
**yg Sering Terjadi dalam**  
**3 Tahun Terakhir**

Jenis Tindak Kriminal	%
Pencurian Ternak	47,5 %
Pencurian Spd Motor	26,9 %
Perampokan	3,8 %
Pembunuhan	1,3 %
Lainnya	20,6 %

Sumber: Data Primer 2009

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa jenis kriminalitas ringan seperti pencurian ternak dan sepeda motor yang mendominasi tindak kriminal dalam 3 tahun terakhir, dimana 75 % lebih tindak kriminalitas yang terjadi berasal dari jenis tersebut. Meskipun berjenis ringan dan secara umum jarang terjadi namun hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak terkait agar tidak menjadi hambatan bagi pengembangan ekonomi di wilayah ini pasca pembangunan jembatan Suramadu.

Dari sisi perilaku tindak kriminal, mayoritas perilaku (83,7%) berasal dari luar wilayah tersebut. Tabel berikut menunjukkan secara lebih detail terkait permasalahan ini.

**Tabel I. 4**  
**Daerah Asal Pelaku Tindak**  
**Kejahatan Yang Tertangkap**

Daerah Asal Pelaku Kriminal	%
Masyarakat Desa	16,3 %
Tetangga Desa	30,3 %
Dari Luar Bangkalan	33,4 %
Pulau Jawa	3,4 %
Lainnya	16,6 %

Sumber: Data Primer 2009

Sangat disayangkan masih adanya pelaku kriminal yang berasal atau asli dari wilayah itu sendiri

meskipun prosentasenya cenderung sedikit bila dibandingkan dengan pelaku yang berasal dari daerah lain diluar wilayah ini. Terkait dengan hal tersebut, maka diharapkan dengan berkembangnya wilayah ini setelah berdirinya jembatan Suramadu, khususnya perkembangan dibidang ekonomi, diharapkan tingkat kriminalitas bisa semakin ditekan lebih kecil lagi.

### **Pemuda dan Kerawanan Sosial**

Generasi muda adalah potensi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kaum muda menyediakan supply tenaga kerja yang nantinya akan sangat diperlukan ketika proses pembangunan wilayah berjalan. Selain itu kreatifitas dan keaktifan pemuda juga sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pembangunan.

Disisi lain kondisi pemuda di suatu wilayah juga berpotensi menghambat proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut akan terjadi bila para pemuda di wilayah tersebut memiliki kecenderungan yang tinggi untuk terjerumus atau terlibat aktif dalam kegiatan kejahatan atau kriminal. Bila hal tersebut terjadi maka kerawanan sosial akan tinggi di wilayah tersebut. Kondisi ini jelas tidak kondusif bagi proses pengembangan atau pembangunan ekonomi wilayah, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Untuk mengetahui kondisi pemuda di wilayah ini, khususnya bila dikaitkan dengan kerawanan sosial tersebut, maka diadakan survey kepada masyarakat terkait potensi kriminalitas pemuda di desa mereka.

Hasil yang diperoleh cukup mengembirakan dimana potensi kriminalitas pemuda di wilayah penelitian cenderung rendah. Hal ini ditunjukkan dengan angka indeks sebesar 3,2 (skala 4). Ini merupakan modal positif yang dimiliki oleh wilayah ini dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya pihak terkait harus meningkatkan modal positif yang sudah dimiliki oleh wilayah ini dengan meningkatkan kualitas pemuda khususnya yang terkait dengan skill dan mentalitas.

#### **Konflik dan Penyelesaiannya**

Faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan suatu wilayah adalah masalah konflik yang ada, baik potensi terjadinya konflik maupun proses atau mekanisme penyelesaian suatu konflik. Bisa dipastikan suatu wilayah yang dikategorikan wilayah konflik atau berpotensi tinggi terjadi konflik akan sangat kesulitan untuk bisa mengembangkan potensi perekonomiannya.

Sumber kesulitan itu bisa bersifat internal maupun eksternal. Internal berarti bahwa sumber daya dari dalam wilayah itu sendiri tidak bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah karena harus difokuskan untuk menghadapi konflik dari masing-masing pihak. Selain itu juga bahwa masyarakat di wilayah itu sendiri juga akan berfikir bahwa setiap usaha mengembangkan wilayah mereka pasti tidak akan berhasil sebelum konflik bisa diselesaikan dengan baik.

Dari sisi eksternal terkait dengan masalah investasi dari luar dan ketidakpercayaan masyarakat di luar

wilayah tersebut terhadap potensi apapun yang dimiliki oleh wilayah yang terlibat dalam konflik. Tentu akan sangat susah bisa menarik investor dari luar baik investor nasional apalagi internasional bila suatu wilayah berada pada kondisi konflik ataupun memiliki potensi konflik yang tinggi. Masyarakat diluar wilayah konflik tersebut juga menaruh ketidakpercayaan terhadap potensi apapun yang ditawarkan oleh wilayah ini. Hal ini akan berdampak pada tidak kompetitifnya setiap produk atau jasa yang berasal dari wilayah konflik, dan ujung ujungnya adalah terhambatnya pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Karena pentingnya masalah konflik ini, maka penelitian ini berusaha menggali info tentang potensi konflik khususnya konflik antar sesama warga masyarakat tersebut. Ada 4 acuan yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi terkait dengan konflik, yaitu; potensi terjadinya konflik horizontal diantara warga masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian konflik yang selama ini terjadi, peran aktif pemerintah desa dalam mencegah konflik horizontal serta peran aktif tokoh masyarakat dalam mencegah konflik horizontal.

Dari hasil survey diperoleh informasi yang cukup mengembirakan terkait dengan potensi terjadinya konflik antar warga sekitar atau konflik horizontal. Menurut evaluasi internal masyarakat wilayah tersebut, mereka percaya bahwa potensi konflik horizontal sangat rendah. Hal ini terungkap dari nilai indeks yang cukup baik bagi indikator ini,

yaitu 3,4 (skala 4). Dengan kata lain, kecenderungan terjadinya konflik di wilayah sekitar kaki jembatan Suramadu sisi Madura ini sangat rendah. Ini merupakan modal positif bagi wilayah ini terkait rencana pengembangan dan pembangunan ekonomi wilayah tersebut pasca berdirinya jembatan Suramadu.

Indikator berikutnya yang digunakan untuk memotret kondisi masyarakat terkait dengan konflik dan potensinya adalah mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian konflik yang selama ini pernah terjadi. Dari angka indeks terkait hal tersebut diperoleh nilai sebesar 2,8 (skala 4). Kalo dilihat dari nilai angka indeks ini secara umum masyarakat sudah cukup puas meskipun belum maksimal. Memang masih perlu di tingkatkan, meskipun demikian kecenderungan ini sudah merupakan modal yang cukup baik bagi upaya peningkatan selanjutnya.

Terkait dengan jenis konflik yang pernah terjadi selama ini di dominasi oleh konflik yang tidak bersifat sara (suku agama dan ras) sehingga kecenderungan penyelesaiannya reatif lebih mudah. Jenis jenis konflik yang pernah terjadi di wilayah ini bisa dilihat dari tabel berikut:

**Tabel I. 5**  
**Jenis Konflik yg Pernah Terjadi dalam 3 Tahun Terakhir**

Jenis Konflik	%
Warisan	34,1 %
Antar Pemuda	16,9 %
Antar Kelompok Masyarakat	11,3 %
Cinta Segitiga	6,6 %
Lainnya	31,3 %

Sumber: Data Primer 2009

Terlihat dari tabel bahwa dalam 3 tahun terakhir sumber konflik didominasi oleh masalah warisan yang bersifat internal keluarga dan masalah gesekan antar pemuda desa maupun kelompok masyarakat. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait khususnya masalah penyelesaian dan pencegahannya agar tidak mengganggu proses pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah.

Untuk pembahasan mengenai peran aktif pemerintah desa dalam mencegah konflik horisontal dan peran aktif pemerintah desa dalam mencegah konflik horisontal akan dibahas pada sub-bab berikut ini.

#### **Peran Lembaga Formal**

Sebagaimana telah dibahas di bagian awal bab ini bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang berkesinambungan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya ketertiban dan keteraturan masyarakat suatu wilayah, maka peran lembaga formal untuk mewujudkan hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat vital. Karena studi ini bersifat eksplorasi wilayah khususnya sekitar jembatan Suramadu sisi Madura maka lembaga formal yang menjadi fokus studi adalah lembaga desa sebagai lembaga formal terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa.

Untuk menilai peran lembaga formal di wilayah ini digunakan dua indikator utama, yaitu, pertama tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan masyarakat desa. Sedangkan yang kedua adalah peran



aktif pemerintah desa dalam mencegah konflik horisontal.

Dari kedua indikator ini diperoleh suatu kesimpulan yang menggembirakan. Kepuasan masyarakat di daerah studi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa cukup tinggi, atau secara umum masyarakat desa merasa puas dengan kinerja pemerintahan desa. Hal ini tercermin dari nilai indeks indikator sebesar 3,0 (skala 4). Angka ini memcerminkan bahwa secara umum masyarakat merasa puas terhadap performa lembaga desa dimana mereka tinggal. Ini juga merupakan potensi positif dari sisi kelembagaan kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah.

Sedangkan dari peran aktif pemerintah desa dalam mencegah konflik horisontal diperoleh angka indeks sebesar 2,9 (skala 4). Nilai ini bisa dikatakan cukup baik karena menggambarkan tingkat keaktifan lembaga formal di desa mereka dalam penyelesaian konflik horisontal. Meskipun demikian perbaikan tentunya masih diperlukan agar lembaga formal desa bisa lebih aktif lagi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga formal yang ada di wilayah mereka. Karena dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga formal maka kewibawahan lembaga formal bisa terjaga.

Tentunya hal tersebut hanya bisa terwujud bila ada usaha yang serius dari lembaga desa itu sendiri untuk memperbaiki diri dengan menunjukkan keseriusan dalam kinerja

mereka. Dengan adanya persepsi positif dari masyarakatnya sendiri bahwa lembaga desa mereka berperan aktif dalam mencegah terjadinya konflik horisontal merupakan suatu modal dasar positif dari sisi kelembagaan bagi pengembangan dan pembangunan ekonomi di wilayah ini.

Khusus terkait dengan keaktifan lembaga formal dan informal terkait dengan sosialisasi pembangunan jembatan Suramadu, masyarakat juga menilai bahwa perangkat desa adalah pihak yang paling aktif berperan. Tabel berikut menunjukkan urutan atau ranking pihak-pihak formal maupun nonformal yang menurut masyarakat sekitar berperan aktif dalam sosialisasi pembangunan jembatan Suramadu.

**Tabel I. 6**  
**Urutan Pihak Terkait**  
**Yang Paling Aktif dalam Sosialisasi**  
**Pembangunan Jembatan Suramadu**

Ranking	Pihak/Lembaga Terkait (Formal & Non- Formal)
1	Perangkat Desa
2	Pengajian Rutin
3	Badan Perwakilan Desa
4	PKK Desa

Sumber: Data Primer 2009

Dari tabel tersebut bisa dilihat, bahwa berdasarkan penilaian langsung masyarakat, perangkat desa menjadi pihak yang paling aktif dalam sosialisasi pembangunan jembatan Suramadu. Hal ini menunjukkan fungsi lembaga formal desa yang berjalan dengan cukup baik. Hal ini merupakan hal positif yang bisa mendukung pengembangan dan pembangunan ekonomi di wilayah ini.

### Lembaga Informal & Peran Tokoh Masyarakat

Selain lembaga formal termasuk didalamnya aparat desa, lembaga non-formal yang ada di dalam masyarakat beserta tokoh masyarakat perlu juga diperhatikan keberadaannya. Karena seringkali justru dari merekalah muncul ide-ide maupun inisiatif terkait pembangunan dan pengembangan wilayah. Terlebih lagi di daerah rural dimana hubungan kekerabatan dan kemasyarakatan masih jauh lebih erat di banding daerah-daerah urban atau perkotaan.

Konsekuensi logis dari fenomena ini adalah kuatnya pola hubungan informal daripada pola hubungan formal. Pola hubungan masyarakat rural yang informal ini pada akhirnya juga akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang bersifat informal beserta lembaganya yang juga bersifat informal. Oleh karena itu kerjasama dari kedua jenis lembaga yang hidup dimasyarakat rural ini jelas akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pengembangan dan pembangunan masyarakat di daerah tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini juga berusaha menggali informasi mengenai kelembagaan yang bersifat informal ini termasuk didalamnya peran pemimpin informal masyarakat dalam kehidupan masyarakat di wilayah penelitian ini sehari hari.

Dalam kasus pembangunan jembatan Suramadu lembaga informal memiliki peran yang cukup strategis dalam proses sosialisasi. Hal ini terlihat dari tabel sebelumnya tentang

urutan atau ranking pihak yang paling aktif dalam sosialisasi pembangunan jembatan Suramadu. Pengajian rutin merupakan sarana atau lembaga yang bersifat informal yang paling sering digunakan untuk melakukan sosialisasi setelah perangkat desa.

Hasil ini selaras dengan urutan atau ranking lembaga non-formal yang memiliki pengaruh besar kepada masyarakat di wilayah tersebut. Tabel berikut menunjukkan urutan pengaruh lembaga non-formal tersebut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

**Tabel I. 7**  
**Ranking Lembaga Non-Formal yang Paling Berpengaruh dalam Kehidupan Masyarakat**

Ranking	Jenis Lembaga Non-Formal
1	Pengajian/Yasinan/Keagamaan
2	Karang Taruna
3	Perkumpulan Olah Raga
4	Dasa Wisma / PKK

Sumber: Data Primer 2009

Selain itu bila dilihat dari indikator angka indeks terkait peran aktif tokoh masyarakat dalam mencegah konflik horisontal juga cukup tinggi. Dengan nilai indeks 2,9 (skala 4) menunjukkan bahwa tokoh masyarakat cukup berperan aktif dalam mencegah terjadinya konflik horisontal. Ini juga mencerminkan tingkat kepedulian tokoh masyarakat terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya. Hal ini tentunya menjadi modal yang positif dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah ini.

### Lembaga Pendukung dan Kebutuhan Regulasi Baru

Keberadaan lembaga pendukung non-pemerintah seperti lembaga

ekonomi juga merupakan suatu hal yang penting dalam proses pengembangan dan pembangunan ekonomi. Keberadaan berbagai lembaga formal swasta tersebut bisa dilihat dari cerminan tingkat keteraturan masyarakat. Semakin banyak lembaga seperti itu ada atau berperan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat maka semakin terbiasa masyarakat terhadap keteraturan dan pola kehidupan masyarakat yang terorganisasi dimana merupakan ciri dari masyarakat modern yang selalu ingin maju.

Khusus untuk lembaga ekonomi non-pemerintah, terdapat beberapa lembaga yang menurut penilaian masyarakat di wilayah tersebut memiliki peran dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Tabel berikut menunjukkan beberapa lembaga tersebut.

**Tabel I. 8**  
**Lembaga Ekonomi Non-Pemerintah Paling Berperan dlm Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa**

Ranking	Lembaga Ekonomi
1	Koperasi
2	Lembaga Usaha Ekonomi Desa
3	Bank Perkreditan Rakyat
4	Bank Umum

Sumber: Data Primer 2009

Selain itu masyarakat di sekitar kaki jembatan Suramadu sisi Madura juga berharap pemerintah bersedia untuk memfasilitasi dalam penyediaan lembaga atau institusi terkait dengan pengembangan kapasitas masyarakat. Tabel berikut menunjukkan jenis

lembaga pengembangan kapasitas masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

**Tabel I. 9**  
**Lembaga Pengembangan Kapasitas yang Diinginkan oleh Masyarakat**

Ranking	Lembaga Pengembangan Kapasitas
1	Balai Latihan Kerja
2	Lembaga Pendidikan Ketrampilan/Kejuruan
3	Lembaga Kursus
4	Sanggar Belajar Anak

Sumber: Data Primer 2009

Dengan berdirinya jembatan Suramadu, masyarakat di wilayah tersebut merasa pemerintah sangat perlu untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal. Hal ini tercermin dari nilai indeks tentang kebutuhan terhadap aturan baru pelindung kepentingan masyarakat lokal yang mencapai angka 3,5 (skala 4). Dari nilai indeks yang tinggi ini terlihat bahwa masyarakat lokal merasa khawatir terhadap dampak negatif Berdirinya jembatan Suramadu terhadap kepentingan lokal mereka.

Oleh karena itu masyarakat lokal merasa memerlukan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi untuk menjamin kepentingan lokal serta budaya lokal yang selama ini mereka junjung tinggi. Masyarakat menginginkan ada semacam aturan atau regulasi khusus terhadap hal ini. Tabel Berikut menunjukkan hal-hal yang masyarakat ingin pemerintah melindunginya melalui aturan atau regulasi khusus.

**Tabel I. 10**  
**Bidang yang Menurut Masyarakat Perlu Dilindungi dengan Regulasi Khusus**

Ranking	Bidang yang Ingin Dilindungi
1	Adat Istiadat
2	Perekonomian Masyarakat Lokal
3	Lingkungan Hidup
4	Budaya Lokal

Sumber: Data Primer 2009

Kekhawatiran masyarakat tersebut bisa dipahami dan adalah sesuatu yang wajar bila mereka merasa khawatir akan dampak negatif dari berdirinya jembatan Suramadu kepada komunitas mereka. Apalagi selama ini dikenal bahwa masyarakat madura secara umum dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi dan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap adat istiadat masyarakat tersebut.

Dalam hal ini perlu diberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di wilayah tersebut. Selain karena keinginan mulia mereka untuk melestarikan adat istiadat dan hal hal terkait ekonomi dan budaya lokal demi kesejahteraan bersama, masyarakat juga berkeinginan untuk menggunakan jalur legal formal yang tidak konfrontatif. Hal ini juga bisa dilihat sebagai salah satu indikator tingkat kedewasaan masyarakat di sekitar Jembatan Suramadu sisi Madura terhadap regulasi dan kelembagaan.

## **ANALISIS KONDUSIFITAS KELEMBAGAAN DAN SOSIO-KULTURAL SETIAP DESA**

Pada bagian ini akan dilihat tingkat kondusifitas kelembagaan dan sosio-kultural secara lebih spesifik di tingkat desa di sekitar kaki Suramadu sisi Madura. Ada 8 desa yang masuk dalam kategori wilayah pengembangan kaki jembatan Suramadu sisi Madura. Desa-desa tersebut adalah desa:

1. Desa Pangpong
2. Desa Morkepek
3. Desa Burneh
4. Desa Sukolilo Barat
5. Desa Patepan
6. Desa Baengas
7. Desa Sendang Dajah
8. Desa Masaran

Pola analisis yang digunakan pada bagian ini bisa dikatakan identik dengan pola yang digunakan pada pembahasan sebelumnya atau pada pembahasan tingkat wilayah. Oleh karena itu setiap desa akan dibahas secara ringkas dan padat berdasarkan data-data primer atau temuan di masyarakat.

## 1. Desa Pangpong

**Tabel II. 1**  
**Indikator Utama Kondusifitas Kelembagaan & Sosio-Kultural**  
**Desa Pangpong**

No	Jenis Indikator	Angka Indeks*
1	Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara	3.18
2	Tingkat Kriminalitas	2.83
3	Potensi Kriminalitas Pemuda	3.28
4	Potensi Konflik Horisontal	3.26
5	Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal	2.97
6	Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal	2.76
7	Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal	2.73
8	Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.03
9	Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal	3.71

Sumber: Data Primer 2009, diolah

### Potensi

Indikator utama kondusifitas di desa Pangpong yang memiliki nilai angka indeks diatas nilai angka indeks wilayah adalah:

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
2. Potensi Kriminalitas Pemuda
3. Kebutuhan terhadap aturan baru pelindung kepentingan masyarakat lokal.

### Tantangan yang dihadapi

Meskipun secara umum kondisi desa Pangpong jika dilihat dari indikator utama kondusifitas cukup baik tetapi ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan. Hal ini karena secara umum nilai indeks untuk beberapa permasalahan yang terkait di desa Pangpong masih berada di bawah nilai indeks wilayah yang di bahas pada bagian sebelumnya. Indikator tersebut adalah:

1. Tingkat kriminalitas
2. Potensi konflik horisontal
3. Kepuasan terhadap penyelesaian konflik
4. Peran aktif pemerintah desa dalam mencegah konflik

5. Peran aktif tokoh masyarakat dalam mencegah konflik
6. Kepuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

Dari sisi perekonomian, BPR dan Lembaga usaha ekonomi desa adalah lembaga yang paling berpengaruh dalam perekonomian masyarakat desa. Ini bisa menjadi arahan bagi pemerintah jika ingin melakukan pengembangan ekonomi khususnya penguatan lembaga ekonomi. Tabel berikut menunjukkan lembaga ekonomi swasta yang memiliki peran dan urutannya terhadap kegiatan perekonomian masyarakat desa Pangpong.

**Tabel II. 2**  
**Lembaga Ekonomi Non-Pemerintah yang Paling Berperan**  
**dlm Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Ranking	Lembaga Ekonomi
1	Bank Perkreditan Rakyat
2	Lembaga Usaha Ekonomi Desa
3	Koperasi
4	Bank Umum

Sumber: Data Primer 2009

## 2. Desa Morkepek

Tabel II. 3

**Indikator Utama Kondisifitas Kelembagaan & Sosio-Kultural Desa Morkepek**

No	Jenis Indikator	Angka Indeks*
1	Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara	3.00
2	Tingkat Kriminalitas	3.15
3	Potensi Kriminalitas Pemuda	3.71
4	Potensi Konflik Horisontal	3.17
5	Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal	2.49
6	Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal	2.53
7	Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal	2.79
8	Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.92
9	Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal	3.43

Sumber: Data Primer 2009, diolah

### Potensi

Potensi ini tercermin dari nilai angka indeks beberapa indikator utama desa Morkepek memiliki nilai angka indeks diatas nilai angka indeks wilayah, yaitu:

1. Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara
2. Tingkat Kriminalitas
3. Potensi Kriminalitas Pemuda

### Tantangan yang dihadapi

Indikator utama yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan karena nilainya dibawah rata-rata wilayah adalah:

1. Potensi konflik horisontal
2. Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal
3. Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal
4. Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal
5. Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal

Dari ke 6 indikator yang nilai indeksnya dibawah nilai indeks wilayah kaki jembatan Suramadu sisi Madura, terdapat 2 hal utama yang perlumendapat perhatian serius. Ke 2 hal tersebut nilai indeksnya memiliki perbedaan cukup besar bila dibandingkan nilai indeks wilayah. Dua aspek tersebut adalah:

1. Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal
2. Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal

Koperasi adalah lembaga yang paling berpengaruh dalam perekonomian masyarakat desa jika dilihat dari sisi perekonomian. Tabel berikut menunjukkan lembaga ekonomi swasta yang memiliki peran dan urutannya terhadap kegiatan perekonomian masyarakat di desa Morkepek.

Tabel II. 4

**Lembaga Ekonomi Non-Pemerintah Paling Berperan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Ranking	Lembaga Ekonomi
1	Koperasi
2	Bank Umum
3	Lembaga Usaha Ekonomi Desa

Sumber: Data Primer 2009

### 3. Desa Burneh

**Tabel II. 5**  
**Indikator Utama Kondusifitas Kelembagaan & Sosio-Kultural Desa Burneh**

No	Jenis Indikator	Angka Indeks*
1	Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara	2.97
2	Tingkat Kriminalitas	3.00
3	Potensi Kriminalitas Pemuda	2.97
4	Potensi Konflik Horisontal	3.28
5	Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal	2.68
6	Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal	2.95
7	Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal	2.95
8	Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.15
9	Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal	3.70

Sumber: Data Primer 2009, diolah

#### Potensi

Secara umum bila dilihat dari berbagai indikator yang digunakan dalam penelitian ini, maka desa Burneh memiliki potensi-potensi pendukung untuk pengembangan dan pembangunan wilayah kaki jembatan Suramadu sisi Madura. Bahkan beberapa indikator memiliki nilai angka indeks diatas nilai angka indeks wilayah, yaitu:

1. Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara
2. Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal
3. Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal
4. Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal

#### Tantangan yang dihadapi

Meskipun secara umum kondisi desa cukup baik tetapi ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan, yaitu:

1. Tingkat Kriminalitas
2. Potensi Kriminalitas Pemuda
3. Potensi Konflik Horisontal
4. Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal

Dari keempat hal tersebut diatas, kepuasan terhadap penyelesaian konflik horisontal perlu memperoleh perhatian yang serius.

Terkait dengan lembaga perekonomian, koperasi dan BPR adalah lembaga yang paling berpengaruh dalam perekonomian masyarakat desa jika dilihat dari sisi perekonomian.

**Tabel II. 6**  
**Lembaga Ekonomi Non-Pemerintah Paling Berperandalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Ranking	Lembaga Ekonomi
1	Koperasi
2	Bank Perkreditan Rakyat
3	Bank Umum
4	Lembaga Usaha Ekonomi Desa

Sumber: Data Primer 2009

## 4. Desa Sukolilo Barat

**Tabel II. 7**  
**Indikator Utama Kondusifitas Kelembagaan & Sosio-Kultural**  
**Desa Sukolilo Barat**

No	Jenis Indikator	Angka Indeks*
1	Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara	3.05
2	Tingkat Kriminalitas	2.90
3	Potensi Kriminalitas Pemuda	3.28
4	Potensi Konflik Horisontal	3.25
5	Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal	2.94
6	Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal	2.86
7	Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal	3.03
8	Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.00
9	Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal	3.35

Sumber: Data Primer 2009, diolah

**Potensi**

Beberapa indikator terkait indikator utama kondusifitas di desa Sukolilo Barat memiliki nilai angka indeks yang sama atau bahkan diatas nilai angka indeks wilayah, yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Hukum & Peraturan Negara
2. Potensi Kriminalitas Pemuda
3. Kepuasan terhadap penyelesaian konflik horisontal
4. Peran aktif pemerintah desa dalam mencegah konflik horisontal
5. Peran aktif tokoh masyarakat dalam mencegah konflik horisontal
6. Kepuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

**Tantangan yang dihadapi**

Ada beberapa hal yang perlu di tingkatkan untuk beberapa permasalahan yang di desa Sukolilo Barat karena masih berada di bawah nilai indeks wilayah secara rata-rata, yaitu:

1. Tingkat Kriminalitas
2. Potensi konflik horisontal

3. Kebutuhan terhadap aturan baru pelindung kepentingan masyarakat lokal

Dari ketiga indikator yang meskipun sudah baik tetapi relatif masih dibawah kondisi rata-rata wilayah, kondisi tingkat kriminalitas adalah yang paling perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Hal ini karena selain dibawah rata-rata, nilai indeks nya masih dibawah 3,0 (skala 4)

Koperasi dan BPR adalah dua lembaga yang paling berpengaruh dalam perekonomian masyarakat desa jika dilihat dari sisi perekonomian. Tabel berikut menunjukkan lembaga ekonomi swasta yang memiliki peran dan urutannya terhadap kegiatan perekonomian masyarakat.

**Tabel II. 8**  
**Lembaga Ekonomi Non-Pemerintah**  
**Paling Berperan dalam**  
**Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Ranking	Lembaga Ekonomi
1	Koperasi
2	Bank Perkreditan Rakyat
3	Lembaga Usaha Ekonomi Desa
4	Bank Umum

Sumber: Data Primer 2009



## 5. Desa Patepan

**Tabel II. 9**  
**Indikator Utama Kondusifitas Kelembagaan & Sosio-Kultural Desa Patepan**

No	Jenis Indikator	Angka Indeks*
1	Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara	2.59
2	Tingkat Kriminalitas	3.05
3	Potensi Kriminalitas Pemuda	2.88
4	Potensi Konflik Horisontal	3.64
5	Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal	2.89
6	Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal	2.45
7	Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal	2.93
8	Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.73
9	Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal	3.24

Sumber: Data Primer 2009

### Potensi

Beberapa indikator utama kondusifitas desa Patepan memiliki nilai angka indeks yang sama atau bahkan diatas nilai angka indeks wilayah, yaitu:

1. Potensi konflik horisontal
2. Kepuasan terhadap penyelesaian konflik horisontal
3. Peran aktif tokoh masyarakat mencegah konflik horisontal

### Tantangan yang dihadapi

Indikator utama kondusifitas yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan adalah terkait dengan hal-hal berikut:

1. Kepatuhan hukum dan peraturan negara
2. Tingkat Kriminalitas
3. Potensi Kriminalitas Pemuda
4. Peran aktif pemerintah desa mencegah konflik horisontal
5. Kepuasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa
6. kebutuhan terhadap aturan baru pelindung kepentingan masyarakat lokal

Meskipun dari ke enam indikator tersebut nilai indeks untuk desa Patenan dibawah nilai indeks rata-rata

wilayah, namun secara umum sebenarnya selisihnya tidak terlalu signifikan. Akan tetapi ada tiga indikator yang mencerminkan aspek hukum dan kelembagaan, yang memiliki deviasi nilai indeks yang cukup besar. Ketiga indikator yang perlu mendapat perhatian serius tersebut adalah:

1. Kepatuhan hukum dan peraturan negara
2. Peran aktif pemerintah desa mencegah konflik
3. Kepuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

Terkait dengan lembaga perekonomian, koperasi adalah lembaga yang paling berpengaruh dalam perekonomian masyarakat desa jika dilihat dari sisi perekonomian.

**Tabel II. 10**  
**Lembaga Ekonomi Non-Pemerintah Paling Berperan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Ranking	Lembaga Ekonomi
1	Koperasi
2	Lembaga Usaha Ekonomi Desa

Sumber: Data Primer 2009

## 6. Desa Baengas

**Tabel II. 11**  
**Indikator Utama Kondusifitas Kelembagaan & Sosio-Kultural Desa Baengas**

No	Jenis Indikator	Angka Indeks*
1	Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara	3.00
2	Tingkat Kriminalitas	3.67
3	Potensi Kriminalitas Pemuda	3.42
4	Potensi Konflik Horisontal	3.95
5	Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal	2.92
6	Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal	2.92
7	Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal	2.95
8	Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.05
9	Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal	3.52

Sumber: Data Primer 2009

### Potensi

Tidak ada satupun indikator kondusifitas di desa Baengas yang memiliki nilai indeks dibawah nilai indeks tingkat wilayah. Indikator utama kondusifitas di desa Baengas memiliki nilai angka indeks yang sama atau bahkan diatas nilai angka indeks wilayah, yaitu:

1. Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara
2. Tingkat Kriminalitas
3. Potensi Kriminalitas Pemuda

4. Potensi Konflik Horisontal
5. Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal
6. Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal
7. Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal
8. Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
9. Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal

## 7. Desa Sendang Dajah

**Tabel II. 12**  
**Indikator Utama Kondusifitas Kelembagaan & Sosio-Kultural Desa Sendang Dajah**

No	Jenis Indikator	Angka Indeks*
1	Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara	2.49
2	Tingkat Kriminalitas	3.72
3	Potensi Kriminalitas Pemuda	2.97
4	Potensi Konflik Horisontal	3.71
5	Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal	2.73
6	Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal	2.87
7	Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal	3.03
8	Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.92
9	Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal	3.32

Sumber: Data Primer 2009

**Potensi**

Indikator terkait utama kondusifitas desa Sendang Dajah yang memiliki nilai angka indeks yang sama atau bahkan diatas nilai angka indeks wilayah, yaitu:

1. Tingkat Kriminalitas
2. Potensi konflik horisontal
3. Peran aktif pemerintah desa mencegah konflik horisontal
4. Peran aktif tokoh masyarakat mencegah konflik horisontal

**Tantangan yang dihadapi**

Indikator utama kondusifitas yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan adalah terkait dengan hal-hal berikut:

1. Kepatuhan hukum dan peraturan negara
2. Potensi Kriminalitas Pemuda
3. Kepuasan penyelesaian konflik horisontal
4. Kepuasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa
5. kebutuhan terhadap aturan baru pelindung kepentingan masyarakat lokal

Meskipun dari ke lima indikator tersebut nilai indeks untuk desa Sendang Dajah dibawah nilai indeks

rata-rata wilayah, namun secara umum sebenarnya selisihnya tidak terlalu signifikan. Akan tetapi ada satu indikator utama kondusifitas yang selain memiliki deviasi nilai indeks yang cukup besar juga masih dibawah 3,0 (skala 4). Indikator yang perlu mendapat perhatian serius tersebut adalah:

- Kepatuhan hukum dan peraturan negara

Terkait dengan lembaga perekonomian, koperasi adalah lembaga yang paling berpengaruh dalam perekonomian masyarakat desa jika dilihat dari sisi perekonomian. Tabel berikut menunjukkan lembaga ekonomi swasta yang memiliki peran dan urutannya terhadap kegiatan perekonomian masyarakat di desa Sendang Dajah.

Tabel II. 13

Lembaga Ekonomi Non-Pemerintah Paling Berperan dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Ranking	Lembaga Ekonomi
1	Koperasi
1	Lembaga Usaha Ekonomi Desa
2	Bank Perkreditan Rakyat

Sumber: Data Primer 2009

**8. Desa Masaran**

Tabel II. 14

Indikator Utama Kondusifitas Kelembagaan & Sosio-Kultural Desa Masaran

No	Jenis Indikator	Angka Indeks*
1	Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara	3.05
2	Tingkat Kriminalitas	2.65
3	Potensi Kriminalitas Pemuda	3.50
4	Potensi Konflik Horisontal	3.03
5	Kepuasan Penyelesaian Konflik Horisontal	2.58
6	Peran Aktif Pemerintah Desa Mencegah Konflik Horisontal	2.13
7	Peran Aktif Tokoh Masyarakat Mencegah Konflik Horisontal	2.38
8	Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.00
9	Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal	3.50

Sumber: Data Primer 2009

**Potensi**

Indikator utama kondusifitas di desa Masaran memiliki nilai angka indeks yang sama atau bahkan diatas nilai angka indeks wilayah, yaitu:

1. Kepatuhan Hukum & Peraturan Negara
2. Potensi Kriminalitas Pemuda
3. Kepuasan thd Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Kebutuhan thd Aturan Baru Pelindung Kepentingan Masyarakat Lokal

**Tantangan yang dihadapi**

Indikator kondusifitas yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan adalah terkait dengan hal-hal berikut:

1. Tingkat Kriminalitas
2. Potensi konflik horisontal
3. Kepuasan penyelesaian konflik horisontal
4. Peran aktif pemerintah desa mencegah konflik horisontal
5. Peran aktif tokoh masyarakat mencegah konflik horisontal

Dari ke lima indikator nilai indeks untuk desa Masaran yang tergolong dibawah nilai indeks rata-rata wilayah, tiga diantara memiliki deviasi yang signifikan dan perlu mendapat serius. Indikator yang perlu mendapat perhatian serius tersebut adalah:

1. Tingkat Kriminalitas
2. Peran aktif pemerintah desa mencegah konflik horisontal
3. Peran aktif tokoh masyarakat mencegah konflik horisontal

Nilai indeks terburuk untuk indikator tingkat kriminalitas dari seluruh desa yang masuk kedalam wilayah kaki jembatan Suramadu sisi Madura dimiliki oleh desa Masaran.

Hal ini perlu segera ditangani dan mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Karena keamanan suatu wilayah mutlak harus dipenuhi dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah khususnya desa Masaran.

Terkait dengan lembaga perekonomian, lembaga usaha ekonomi desa adalah lembaga yang paling berpengaruh dalam perekonomian masyarakat desa jika dilihat dari sisi perekonomian. Ini bisa menjadi petunjuk dan arahan bagi pemerintah jika ingin melakukan pengembangan ekonomi khususnya penguatan lembaga ekonomi di desa Masaran. Tabel berikut menunjukkan lembaga ekonomi swasta yang memiliki peran dan urutannya terhadap kegiatan perekonomian masyarakat di desa Masaran.

**Tabel II. 15**  
**Lembaga Ekonomi Non-Pemerintah**  
**Paling Berperan dalam**  
**Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Ranking	Lembaga Ekonomi
1	Lembaga Usaha Ekonomi Desa

Sumber: Data Primer 2009

**KESIMPULAN**

Secara umum, dilihat dari sisi kelembagaan dan sosio-kultural masyarakat, wilayah di sekitar jembatan nasional Suramadu sisi Madura cukup kondusif bagi pengembangan ekonomi. Hal ini berarti bahwa tidak hanya potensi ekonomi dan sumberdaya alam saja yang sudah siap bagi pengembangan ekonomi wilayah di Madura sebagaimana beberapa penelitian terdahulu yang telah ada, tetapi juga dari sisi kelembagaan dan sosio-

kultural masyarakat khususnya disekitar jembatan Suramadu juga sudah relatif siap.

Meskipun demikian ada sedikit perbedaan di tiap-tiap desa disekitar jembatan Suramadu sisi Madura terkait kondusifitas kelembagaan dan sosio-kultural ini. Ada desa yang unggul untuk beberapa indikator utama kondusifitas tetapi pada saat yang bersamaan desa tersebut sedikit tertinggal untuk indikator utama lainnya. Satu-satunya desa yang memiliki indikator utama kondusifitas dengan nilai diatas rata-rata wilayah atau setidaknya sama adalah desa Baengas. Sedangkan desa dengan nilai indikator utama kondusifitas yang terendah, dibandingkan dengan nilai wilayah, adalah desa Sendang Dajah untuk indikator 'kepatuhan hukum dan peraturan negara' dengan nilai 2,49.

#### DAFTAR PUSTAKA

----- 2009, Jawa Timur Dalam Angka 2008. Biro Pusat Statistik. Jakarta.

----- 2004, Prospek Investasi Pulau Madura Sebagai Dampak Pembangunan Jembatan Nasional Suramadu, Badan Penanaman Modal (BPM) Jawa Timur, Surabaya.

----- 2010, Skala Likert, Ikatan Perstatistikan Indonesia. 2010. retrieved from: [http://www.statistikaindonesia.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:skala-likert&catid=37](http://www.statistikaindonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60:skala-likert&catid=37)

A Hakim, M Andri 2009, Sosial & Ekonomi Mapping Sisi Madura & Sisi Surabaya Dalam Mendukung Tata Ruang Suramadu, Puslitbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 2002, Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia, UPP AMP YKP, Yogyakarta.

Likert, Rensis 1932, "A Technique for the Measurement of Attitudes", *Archives of Psychology* Vol: 140, No. 55.

Rahayuningsih, Eni Sri 2007, Analisis Potensi Industrialisasi di Madura Pasca Suramadu, Jurnal Neo-Bis Volume 1 No. 2, Desember 2007.

Sclove, Stanley L 2001, Notes on Likert Scale, retrieved from: <http://www.uic.edu/classes/idsc/ids270sls/likert.htm>

Simamora, Bilson 2005. Analisis Multivariat Pemasaran Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Subahariyanto, A dkk 2004, Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur Menjunjung Leluhur, Bayu Media Publishing, Malang.